



Integrasi Kurikulum Sekolah Dan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mencegah Sikap Intoleransi Pada Peserta Didik Era *Post-truth*

Yulius Rustan Effendi ^{✉1}, Didik Iswahyudi ^{✉2}, Elisabeth Djo Io Wea ^{✉3}

Informasi artikel	ABSTRAK
Sejarah Artikel : Diterima Mei Revisi Juni Dipublikasikan Juli	Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum sekolah sebagai strategi pencegahan sikap intoleransi peserta didik di era <i>post-truth</i> , dengan studi kasus di SMP Katolik Santa Maria II Malang. Era <i>post-truth</i> yang sarat hoaks dan disinformasi melalui media digital berpotensi membentuk sikap intoleran, sehingga pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membekali siswa dengan nilai toleransi dan kemampuan berpikir kritis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif untuk mengeksplorasi implementasi kurikulum dan peran guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam kurikulum formal dan kegiatan non-formal, seperti ekstrakurikuler dan program penguatan karakter, dan Budaya sekolah efektif membentuk sikap toleran siswa. Penerapan Kurikulum Merdeka dan literasi digital turut memperkuat ketahanan siswa terhadap disinformasi. Guru memainkan peran sentral sebagai fasilitator dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan holistik yang melibatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Kesimpulannya, integrasi kontekstual dan interdisipliner Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum sekolah terbukti efektif dalam mencegah sikap intoleransi di kalangan peserta didik.
Keywords : Pendidikan Kewarganegaraan, Intoleransi, Kurikulum Sekolah, Era Post- Truth	
How to Cite : Effendi, Y. R., Iswahyudi, D., & Wea, E. D. I. (2026). Integrasi Kurikulum Sekolah Dan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mencegah Sikap Intoleransi Pada Peserta Didik Era <i>Post- Truth</i> . <i>Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan</i> , 11(2), pp. 236-247. DOI: http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v11i2.13621	ABSTRACT <i>Integration of School Curriculum and Civic Education in Preventing Intolerant Attitudes Among Students in the Post-truth Era.</i> This study aims to analyze the integration of Citizenship Education in the school curriculum as a prevention strategy of intolerance of students in the <i>post-truth</i> era, with a case study in the Santa Maria II Catholic Middle School, Malang. The <i>post-truth</i> Era, which is full of hoaxes and disinformation through digital media, has the potential to form intolerant attitudes, so Citizenship Education has an important role in equipping students with the value of tolerance and critical thinking skills. This study uses a qualitative approach through in-depth interviews and participatory observation to explore the implementation of the curriculum and the role of teachers. The results showed that the integration of civic values in formal curricula and non-formal activities, such as extracurriculars and character strengthening programs, effectively shaped students' tolerant attitudes. The implementation of independent curriculum and digital literacy also strengthens students' resilience to disinformation. Teachers play a central role as facilitators in developing critical thinking skills. The study recommends a holistic approach involving cognitive, affective, and psychomotor aspects, as well as collaboration between schools, parents, and the community. In conclusion, contextual and interdisciplinary integration of civic education in the school curriculum proved effective in preventing intolerance among learners.
✉ Alamat korespondensi: Universitas PGRI Kanjuruhan Malang	
✉ E-mail: Djoelisabeth280@gmail.com	

Copyright © 2026 Universitas Muhammadiyah Ponorogo

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang secara historis dan sosiokultural dikenal dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, baik dalam hal etnis, agama, budaya, maupun bahasa.

Keanekaragaman ini secara normatif diposisikan sebagai kekuatan strategis dalam membentuk identitas nasional dan semangat kebangsaan. Namun demikian, dalam praktik sosial kontemporer, keragaman tersebut tidak jarang

justu menjadi titik rawan konflik, terutama dalam bentuk diskriminasi sosial, sektarianisme, hingga kekerasan berbasis identitas. Fenomena intoleransi, yang ditandai dengan ketidaksediaan individu atau kelompok untuk menerima perbedaan keyakinan, pandangan, dan praktik sosial budaya, menjadi salah satu manifestasi dari krisis keberagaman yang kini kian mengemuka, terutama di kalangan generasi muda (Nugroho dkk., 2023).

Meningkatnya sikap intoleransi di lingkungan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial-politik global dan lokal, serta dari pengaruh era *post-truth* yang ditandai dengan menguatnya dominasi emosi dan opini pribadi di atas fakta objektif (Wettergren, 2022). Dalam konteks ini, peserta didik yang merupakan bagian dari generasi digital sangat rentan terhadap penetrasi informasi yang tidak terverifikasi, hoaks, serta ujaran kebencian yang beredar luas di media sosial. Ketika nalar kritis dan literasi digital tidak dibangun secara sistematis, maka potensi penyebaran intoleransi di kalangan pelajar akan semakin besar (Siregar dkk., 2024). Oleh karena itu, institusi pendidikan memiliki tanggung jawab krusial tidak hanya sebagai wahana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter dan nilai-nilai kewarganegaraan yang demokratis, inklusif, dan toleran.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, memiliki posisi strategis sebagai instrumen pedagogis yang bertujuan membentuk warga negara yang tidak hanya taat hukum, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme dan demokrasi (Rosdanilah dkk., 2024). Pendidikan ini bertujuan menginternalisasi kesadaran konstitusional serta membekali peserta didik dengan kecakapan berpikir kritis, pengambilan keputusan etis, dan penghargaan terhadap keberagaman. Namun demikian, efektivitas PPKn dalam membentuk sikap toleran tidak cukup hanya melalui pendekatan normatif atau instruksional, tetapi menuntut integrasi yang lebih kontekstual dan sistemik dalam kurikulum sekolah serta budaya organisasi pendidikan (Fadilah dkk., 2025).

Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa banyak sekolah masih menjalankan PPKn dalam kerangka pengajaran yang bersifat kognitif dan tekstual, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan realitas sosial kontemporer yang kompleks. Sementara itu, penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan

pembelajaran yang konstruktivistik dan berbasis pengalaman nyata lebih efektif dalam membentuk sikap toleran peserta didik (Andriani, 2024); (Ginting dkk., 2024). Dalam hal ini, teori konstruktivisme sosial Vygotsky menawarkan kerangka epistemologis yang relevan, di mana proses pembelajaran dipahami sebagai hasil dari interaksi sosial dan aktivitas reflektif dalam konteks budaya tertentu. Model pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai kewarganegaraan ke dalam kegiatan sekolah dan interaksi sosial dapat meningkatkan kompetensi afektif siswa dalam menghadapi tantangan global, termasuk intoleransi.

Studi ini mengambil konteks empiris di SMP Katolik Santa Maria II Malang, sebuah institusi pendidikan yang secara eksplisit mengintegrasikan ajaran moral Katolik dan nilai-nilai universal dalam kehidupan sekolah. Di tengah pluralitas masyarakat dan arus disinformasi era digital, sekolah ini menjadi representasi menarik untuk mengkaji bagaimana integrasi pendidikan kewarganegaraan ke dalam kurikulum dan praktik sekolah dapat membentuk sikap toleransi peserta didik. Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas pentingnya peran PPKn dalam membentuk karakter kebangsaan (Armianti dkk., 2024), studi yang secara khusus menginvestigasi integrasi holistik antara PPKn, kurikulum sekolah, dan konteks era *post-truth* dalam bentuk studi kasus masih relatif terbatas. Di sinilah letak *research gap* yang ingin dijawab melalui penelitian ini.

Kebaruan dari studi ini terletak pada pendekatannya yang holistik dan kontekstual terhadap integrasi pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum sekolah berbasis studi kasus. Tidak hanya menganalisis dimensi pedagogis, penelitian ini juga mengeksplorasi strategi institusional dan kultural sekolah dalam membentuk ekosistem pendidikan yang toleran. Selain itu, studi ini berkontribusi terhadap literatur dengan menggabungkan pendekatan kualitatif, analisis intersubjektif, dan kajian literatur kontemporer dalam memahami fenomena intoleransi di era *post-truth* dari perspektif pendidikan. Penelitian ini juga memperluas pemahaman tentang bagaimana institusi pendidikan keagamaan dapat memainkan peran penting dalam memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat yang majemuk.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas tantangan tersebut, penelitian ini

merumuskan tiga pertanyaan utama yang menjadi fokus kajian, yaitu: (1) Bagaimana bentuk dan implementasi integrasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum, pembelajaran, dan budaya sekolah dalam upaya mencegah sikap intoleransi pada peserta didik di era post-truth? (2) Apa saja tantangan yang dihadapi sekolah dan guru dalam melaksanakan integrasi nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya terkait penguatan toleransi, literasi digital, dan respons terhadap dinamika informasi di era post-truth? (3) Bagaimana dampak integrasi Pendidikan Kewarganegaraan terhadap pembentukan sikap toleran peserta didik, serta strategi apa yang dikembangkan sekolah untuk memperkuat nilai toleransi melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. SMPK Santa Maria II Malang dipilih secara purposif sebagai locus penelitian berdasarkan pertimbangan kontekstual dan karakteristik kurikuler yang menonjol dalam penguatan nilai-nilai toleransi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan kepala sekolah dan guru PPKn, observasi partisipatif, serta dokumentasi kebijakan dan kegiatan sekolah. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik tematik dan interpretatif yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola integrasi nilai kewarganegaraan serta tantangan dan strategi yang muncul dalam konteks lokal.

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan bentuk dan implementasi integrasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum, pembelajaran, dan budaya sekolah sebagai upaya pencegahan sikap intoleransi pada peserta didik di era post-truth. (2) Menganalisis tantangan yang dihadapi sekolah dan guru dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya terkait penguatan toleransi, literasi digital, serta respons terhadap dinamika informasi pada era post-truth. (3) Mengevaluasi dampak integrasi Pendidikan Kewarganegaraan terhadap pembentukan sikap toleran peserta didik serta mengidentifikasi strategi sekolah dalam memperkuat nilai toleransi melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

konseptual dan praktis dalam pengembangan model integratif pendidikan kewarganegaraan yang adaptif terhadap tantangan era digital, serta mendukung pembentukan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan sosial sebagai warga negara yang toleran dan bertanggung jawab.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan desain etnografi pendidikan. Pendekatan etnografi dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam budaya sekolah, pola interaksi sosial, nilai-nilai yang hidup dalam komunitas pendidikan, serta praktik keseharian yang berkaitan dengan integrasi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan kurikulum sekolah dalam mencegah sikap intoleransi peserta didik di era post-truth. Etnografi pendidikan berfokus pada pemaknaan perilaku, kebiasaan, simbol, dan interaksi sosial yang berkembang dalam lingkungan sekolah sebagai suatu sistem budaya yang unik (Spradley, 1980; Creswell & Poth, 2018).

Penelitian dilaksanakan di SMP Katolik Santa Maria II Malang selama dua bulan, yaitu pada Februari hingga Maret 2026. Secara khusus, kegiatan penelitian lapangan dilakukan melalui keterlibatan langsung peneliti dalam berbagai aktivitas sekolah, baik kegiatan pembelajaran di kelas, kegiatan keagamaan, kegiatan ekstrakurikuler, maupun interaksi sosial peserta didik di lingkungan sekolah. Kehadiran peneliti di lapangan bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai budaya toleransi yang dibangun dan dipraktikkan oleh warga sekolah.

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan beberapa kriteria, yaitu: (1) sekolah yang memiliki keberagaman latar belakang agama dan budaya peserta didik; (2) sekolah yang mengintegrasikan nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan dalam pembelajaran dan budaya sekolah; (3) sekolah yang secara aktif mengembangkan pendidikan karakter dan toleransi; serta (4) sekolah yang memiliki praktik kehidupan multikultural yang relevan dengan fokus penelitian.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap fenomena yang

diteliti. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang yang terdiri atas kepala sekolah, guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), guru Pendidikan Agama, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, serta 3 peserta didik yang berasal dari latar belakang agama dan tingkat kelas yang berbeda.

Kriteria informan ditentukan berdasarkan keterkaitannya dengan fokus penelitian. Kepala sekolah dipilih karena memiliki peran dalam penyusunan kebijakan dan pengembangan budaya sekolah. Guru PPKn dipilih karena terlibat langsung dalam implementasi nilai-nilai kewarganegaraan dan toleransi dalam pembelajaran. Guru Pendidikan Agama dipilih karena berperan dalam penguatan nilai-nilai spiritual dan moderasi beragama. Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dipilih karena memiliki tanggung jawab dalam pembinaan karakter peserta didik melalui berbagai kegiatan sekolah. Sementara itu, peserta didik dipilih berdasarkan kriteria: (1) aktif mengikuti kegiatan pembelajaran dan kegiatan sekolah, (2) berasal dari latar belakang agama yang beragam, dan (3) bersedia memberikan informasi mengenai pengalaman mereka terkait praktik toleransi di lingkungan sekolah.

Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi teknik yang meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas pembelajaran, interaksi antarpeserta didik, kegiatan keagamaan, kegiatan ekstrakurikuler, serta berbagai aktivitas sekolah yang mencerminkan praktik toleransi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengalaman, persepsi, dan strategi yang dikembangkan sekolah dalam mengintegrasikan nilai-nilai toleransi. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa dokumen kurikulum, modul pembelajaran, program sekolah, foto kegiatan, arsip kebijakan sekolah, dan berbagai dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan secara interaktif mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam perspektif etnografi, proses analisis juga dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema budaya, pola interaksi sosial, nilai-nilai yang berkembang dalam komunitas sekolah, serta praktik-praktik pendidikan yang berkontribusi

terhadap penguatan sikap toleransi peserta didik di era post-truth.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Dan Implementasi Integrasi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Kurikulum, Pembelajaran, Dan Budaya Sekolah Dalam Upaya Mencegah Sikap Intoleransi Pada Peserta Didik Di Era Post-Truth

Bentuk dan implementasi integrasi Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) dalam kurikulum, pembelajaran, dan budaya sekolah di SMP Katolik Santa Maria II Malang merupakan strategi komprehensif dalam upaya mencegah sikap intoleransi pada peserta didik di era post-truth. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, observasi kegiatan pembelajaran, serta analisis dokumen sekolah, ditemukan bahwa integrasi nilai-nilai kewarganegaraan tidak hanya dilakukan melalui mata pelajaran PPKn, tetapi juga diinternalisasikan dalam berbagai program sekolah dan budaya keseharian peserta didik. Integrasi tersebut diwujudkan melalui penyelarasan kurikulum, pembelajaran kontekstual, kegiatan pembinaan karakter, serta berbagai aktivitas yang mendorong interaksi lintas agama dan budaya.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa sekolah memandang pendidikan kewarganegaraan bukan sekadar sebagai mata pelajaran yang berorientasi pada penguasaan pengetahuan, melainkan sebagai instrumen pembentukan karakter yang terintegrasi dalam seluruh proses pendidikan. Integrasi yang dilakukan secara menyeluruh memungkinkan nilai-nilai toleransi tidak berhenti pada tataran kognitif, tetapi berkembang menjadi sikap dan perilaku yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Kondisi ini mengindikasikan adanya transformasi fungsi PPKn dari pendekatan yang bersifat normatif menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan transformatif.

Interpretasi tersebut sejalan dengan pandangan Azzahra (2024) dan Hikmah dkk. (2024) yang menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang efektif harus mampu menghubungkan nilai-nilai kebangsaan dengan realitas kehidupan peserta didik. Temuan ini juga diperkuat oleh Sulianti dkk. (2020) yang menjelaskan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila secara eksplisit dalam pembelajaran dapat meningkatkan kesadaran kritis, empati

sosial, dan kemampuan peserta didik dalam menghargai keberagaman.

Hal tersebut tercermin dalam pernyataan kepala sekolah yang menyatakan bahwa “Di sekolah kami, mata pelajaran PPKn konsisten mengintegrasikan nilai Pancasila dan toleransi, sehingga membentuk karakter siswa yang menghargai perbedaan untuk masa depan bangsa secara utuh” (Kepala Sekolah, 22 Februari 2026). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa integrasi nilai toleransi telah menjadi bagian dari kebijakan institusional sekolah dan tidak hanya bergantung pada inisiatif individual guru. Temuan ini mengindikasikan adanya komitmen organisasi dalam membangun budaya sekolah yang inklusif.

Interpretasi tersebut sejalan dengan Efendi dkk. (2020) yang menyatakan bahwa keberhasilan pendidikan kewarganegaraan tidak diukur dari kemampuan peserta didik menghafal konsep kebangsaan, melainkan dari kemampuan mereka menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam perilaku sosial yang nyata. Oleh karena itu, integrasi yang dilakukan SMP Katolik Santa Maria II Malang dapat dipahami sebagai bentuk implementasi pendidikan kewarganegaraan yang berorientasi pada pembentukan warga negara yang demokratis, toleran, dan bertanggung jawab.

Dalam implementasinya, integrasi PPKn di SMP Katolik Santa Maria II Malang diwujudkan melalui penyelarasan kurikulum, proses pembelajaran, dan budaya sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kewarganegaraan tidak hanya diajarkan dalam mata pelajaran PPKn, tetapi juga diintegrasikan melalui berbagai mata pelajaran, kegiatan sekolah, serta program pembinaan karakter. Pada aspek pembelajaran, guru menerapkan pendekatan interaktif dan kontekstual dengan mengaitkan materi pada isu-isu aktual, termasuk intoleransi dan tantangan kehidupan digital. Sementara itu, budaya sekolah dibangun melalui kegiatan seperti live in, bina iman, dan forum diskusi lintas kelas yang mendorong interaksi sosial yang inklusif.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa integrasi nilai kewarganegaraan dilaksanakan secara holistik dan tidak terbatas pada proses pembelajaran di kelas. Integrasi yang melibatkan aspek kurikulum, pembelajaran, dan budaya sekolah memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang menyentuh ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik secara bersamaan. Kondisi ini

mendukung terbentuknya lingkungan sekolah yang kondusif bagi penguatan sikap toleran dan penghargaan terhadap keberagaman. Interpretasi ini sejalan dengan Ridha dkk. (2025) yang menyatakan bahwa integrasi multidimensional dalam pendidikan karakter mampu menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis dan mendukung perkembangan karakter peserta didik.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai kewarganegaraan juga berfungsi sebagai sarana penguatan literasi sosial peserta didik dalam menghadapi tantangan era post-truth. Melalui pembelajaran yang mengaitkan nilai Pancasila dengan isu-isu aktual, siswa dilatih untuk berpikir kritis, reflektif, dan mampu menilai validitas informasi yang mereka peroleh dari berbagai media. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berperan dalam pembentukan karakter, tetapi juga dalam pengembangan kemampuan literasi kritis yang diperlukan untuk menghadapi disinformasi dan intoleransi digital. Hasil penelitian ini mendukung temuan Fadilah (2025) yang menjelaskan bahwa integrasi nilai kewarganegaraan dengan isu-isu kontemporer mampu meningkatkan daya tangkal peserta didik terhadap narasi yang berpotensi mengganggu kohesi sosial.

Selain melalui pembelajaran formal, penguatan nilai toleransi juga dilakukan melalui budaya sekolah dan berbagai kegiatan nonformal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pelayanan sosial, kolaborasi antaragama, dan program pengembangan karakter berbasis spiritualitas Katolik memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik untuk mempraktikkan nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Temuan ini menunjukkan bahwa pembentukan sikap toleran lebih efektif ketika peserta didik memperoleh kesempatan untuk mengalami dan mempraktikkan nilai tersebut secara nyata. Interpretasi tersebut sejalan dengan penelitian Puspita (2024) dan Utama dkk. (2024) yang menegaskan bahwa pengalaman langsung berbasis nilai Pancasila lebih efektif dalam membentuk sikap inklusif dibandingkan pendekatan yang hanya berorientasi pada aspek kognitif.

Keberhasilan integrasi nilai kewarganegaraan juga didukung oleh peran guru sebagai fasilitator pembelajaran, mediator nilai, sekaligus teladan bagi peserta didik. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membangun ruang dialog, membimbing refleksi peserta didik, serta menanamkan nilai toleransi melalui keteladanan dalam interaksi sehari-hari. Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas integrasi nilai sangat dipengaruhi oleh kompetensi pedagogik guru dalam merancang pembelajaran yang berbasis nilai dan kontekstual. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Surtini dan Muhtar (2024) yang menegaskan bahwa kompetensi pedagogik guru merupakan faktor penting dalam keberhasilan pendidikan karakter.

Dengan demikian, integrasi Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Katolik Santa Maria II Malang menunjukkan pendekatan yang holistik dan adaptif melalui sinergi antara kurikulum, pembelajaran, dan budaya sekolah. Temuan ini mengindikasikan bahwa integrasi nilai kewarganegaraan tidak hanya efektif dalam membentuk sikap toleran peserta didik, tetapi juga berkontribusi dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang diperlukan untuk menghadapi tantangan era post-truth.

Tantangan Yang Dihadapi Sekolah Dan Guru Dalam Melaksanakan Integrasi Nilai-Nilai Pendidikan Kewarganegaraan, Khususnya Terkait Penguatan Toleransi, Literasi Digital, Dan Respons Terhadap Dinamika Informasi Di Era Post-Truth

Tantangan yang dihadapi sekolah dan guru dalam melaksanakan integrasi nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) pada era *post-truth* menunjukkan kompleksitas yang mencakup aspek teknis, kultural, dan interpersonal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola akses dan konsumsi informasi peserta didik, sehingga sekolah dituntut tidak hanya menjadi ruang transfer pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang penguatan literasi digital dan pembentukan karakter.

Pada aspek teknis, tantangan utama terletak pada kemampuan peserta didik dalam memilah informasi yang valid di tengah maraknya disinformasi dan konten digital yang bersifat manipulatif. Untuk merespons kondisi tersebut, guru berupaya mengintegrasikan literasi digital dalam pembelajaran PPKn melalui pendekatan kontekstual yang menghubungkan materi dengan realitas kehidupan peserta didik. Sebagaimana diungkapkan oleh guru PPKn: "Dalam pembelajaran, saya mengaitkan isu toleransi

melalui diskusi interaktif, sehingga siswa lebih kritis memahami keberagaman dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila untuk membangun harmoni sosial secara konsisten" (Guru PPKn, 15 Februari 2026).

Temuan ini menunjukkan bahwa guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap berbagai informasi yang mereka peroleh melalui media digital. Namun demikian, optimalisasi literasi digital masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan infrastruktur dan kapasitas pendidik dalam memanfaatkan teknologi secara maksimal. Temuan ini sejalan dengan Hidayah dkk. (2023) yang menjelaskan bahwa keterbatasan akses teknologi dan minimnya pelatihan guru menjadi hambatan dalam pengembangan literasi digital di lingkungan pendidikan.

Selain tantangan teknis, penelitian juga menemukan adanya tantangan kultural yang berkaitan dengan keberagaman latar belakang agama dan budaya peserta didik. Keberagaman tersebut merupakan modal sosial yang penting, tetapi juga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman apabila tidak dikelola secara tepat. Hasil observasi menunjukkan bahwa pengaruh media sosial sering kali membawa nilai-nilai baru yang tidak selalu selaras dengan nilai kebangsaan dan toleransi yang dikembangkan sekolah. Dalam beberapa situasi, stereotip sosial dan candaan yang bernuansa SARA berpotensi menjadi pemicu munculnya sikap eksklusif di kalangan peserta didik.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan toleransi tidak cukup dilakukan melalui penyampaian materi di kelas, tetapi memerlukan ruang dialog yang memungkinkan peserta didik belajar memahami dan menghargai perbedaan. Interpretasi ini sejalan dengan Darmawati (2022) yang menyatakan bahwa interaksi antarbudaya yang tidak disertai pengelolaan yang baik berpotensi menimbulkan ketegangan sosial. Selain itu, Bordier dkk. (2021) menegaskan bahwa forum dialog partisipatif menjadi salah satu strategi efektif dalam mengelola keberagaman dan mencegah berkembangnya prasangka sosial di lingkungan pendidikan.

Tantangan berikutnya muncul pada aspek interpersonal, yaitu dalam interaksi antara peserta didik maupun antara peserta didik dan guru. Perbedaan karakter, latar belakang, dan

pemahaman terhadap norma sosial terkadang memunculkan miskomunikasi yang berpotensi berkembang menjadi konflik. Terkait hal tersebut, kepala sekolah menyatakan: “Ketika terjadi konflik antara siswa atau antara siswa dan guru, telah ada SOP yang jelas untuk penanganan” (Kepala Sekolah, 22 Februari 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sekolah telah memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang terstruktur. Namun demikian, keberadaan prosedur formal tetap perlu didukung oleh kemampuan dialogis dan komunikasi interpersonal yang baik. Temuan ini memperlihatkan bahwa pendidikan toleransi tidak hanya berkaitan dengan pemahaman nilai, tetapi juga kemampuan peserta didik dalam membangun hubungan sosial yang harmonis. Hasil penelitian ini mendukung temuan Arifin (2024) dan Rodrigues (2021) yang menjelaskan bahwa pendekatan dialogis dan partisipatif efektif dalam mengurangi konflik interpersonal sekaligus meningkatkan kesadaran reflektif peserta didik terhadap pentingnya toleransi.

Lebih lanjut, penelitian menunjukkan bahwa era *post-truth* turut mempercepat penyebaran narasi intoleransi melalui media digital. Informasi yang mengandung ujaran kebencian, stereotip, maupun polarisasi identitas dapat dengan mudah diakses oleh peserta didik dan berpotensi memengaruhi cara pandang mereka terhadap kelompok lain. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, sekolah mengembangkan berbagai kegiatan kolaboratif seperti forum kerukunan siswa dan bakti sosial lintas kelas yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berinteraksi secara positif dalam keberagaman. Temuan ini menunjukkan bahwa pengalaman sosial secara langsung menjadi sarana penting dalam membangun empati dan mengurangi prasangka. Interpretasi tersebut sejalan dengan Luthfiyah dkk. (2022) yang menyatakan bahwa pembelajaran kolaboratif lintas budaya dan agama efektif dalam memperkuat empati sosial dan sikap inklusif peserta didik.

Penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian peserta didik masih memandang mata pelajaran PPKn sebagai mata pelajaran yang bersifat normatif dan kurang relevan dengan kehidupan mereka. Persepsi tersebut menjadi hambatan dalam proses internalisasi nilai toleransi apabila pembelajaran tidak dikaitkan dengan pengalaman nyata peserta didik. Oleh karena itu, guru mulai menerapkan pendekatan

studi kasus aktual yang berkaitan dengan perundungan digital, hoaks, maupun konflik sosial yang dekat dengan kehidupan siswa. Temuan ini menunjukkan bahwa relevansi materi pembelajaran menjadi faktor penting dalam meningkatkan keterlibatan peserta didik. Hasil penelitian ini sejalan dengan Hikmat dkk. (2024) yang menegaskan bahwa pembelajaran PPKn berbasis pengalaman dan isu aktual lebih efektif dalam membangun kesadaran kritis serta empati sosial peserta didik.

Selain berbagai tantangan tersebut, penelitian juga menemukan sejumlah faktor pendukung yang memperkuat keberhasilan integrasi nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan. Faktor pendukung utama meliputi komitmen sekolah dalam membangun budaya yang inklusif, kolaborasi antara guru PPKn, guru agama, guru BK, wali kelas, dan bidang kesiswaan, serta keberagaman peserta didik yang menjadi sarana pembelajaran toleransi secara langsung. Berbagai program sekolah seperti Bina Iman, live in, bakti sosial, dan forum dialog lintas agama juga memberikan pengalaman nyata bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan karakter tidak hanya bergantung pada pembelajaran di kelas, tetapi juga pada dukungan budaya sekolah yang konsisten. Hasil penelitian ini sejalan dengan Rosdanilah dkk. (2024) dan Puspita dkk. (2024) yang menegaskan bahwa kolaborasi seluruh warga sekolah serta pengalaman sosial yang autentik berkontribusi signifikan terhadap pembentukan karakter toleran.

Di sisi lain, faktor penghambat yang ditemukan meliputi pengaruh media sosial, rendahnya literasi digital sebagian peserta didik, perbedaan latar belakang keluarga, keterbatasan waktu pembelajaran PPKn, serta kecenderungan siswa menganggap PPKn sebagai mata pelajaran yang bersifat teoritis. Temuan ini menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai kewarganegaraan dipengaruhi oleh faktor sekolah maupun faktor eksternal yang berasal dari keluarga, masyarakat, dan lingkungan digital. Oleh karena itu, keberhasilan integrasi nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan memerlukan sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat agar proses pembentukan karakter dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Dengan demikian, tantangan integrasi nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan di era *post-truth* tidak hanya berkaitan dengan

perkembangan teknologi informasi, tetapi juga menyangkut dinamika sosial, budaya, dan interpersonal yang memengaruhi kehidupan peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik melalui penguatan literasi digital, dialog lintas budaya, pembelajaran kontekstual, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk membentuk peserta didik yang toleran, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.

Dampak Integrasi Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Pembentukan Sikap Toleran Peserta Didik, Serta Strategi Apa Yang Dikembangkan Sekolah Untuk Memperkuat Nilai Toleransi Melalui Kegiatan Intrakurikuler, Kokurikuler, Dan Ekstrakurikuler

Dampak integrasi Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) terhadap pembentukan sikap toleran peserta didik di SMP Katolik Santa Maria II Malang menunjukkan hasil yang signifikan dan komprehensif, baik pada ranah kognitif, afektif, maupun sosial. Berdasarkan hasil observasi, pengamatan, serta penilaian melalui rapor pendidikan, terlihat bahwa nilai-nilai kebangsaan tidak hanya dipahami secara intelektual, tetapi juga diinternalisasi secara emosional oleh peserta didik. Pengintegrasian nilai PPKn secara holistik mampu membangun identitas kebangsaan yang kokoh, di mana siswa tidak hanya mempelajari konsep Pancasila dan UUD 1945, tetapi juga mengimplementasikannya dalam kehidupan sosial sehari-hari. Hal ini sejalan dengan pandangan Hikmat dkk. (2024) yang menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus bersifat transformatif, yakni mampu mengubah perilaku dan sikap melalui pendekatan kontekstual dan partisipatif.

Implementasi integrasi tersebut diwujudkan melalui berbagai aktivitas pembelajaran yang memadukan teori dan praktik, seperti diskusi kelompok, simulasi sidang, serta kegiatan berbasis komunitas. Aktivitas ini mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam mengamati, menganalisis, serta merumuskan solusi atas persoalan sosial yang mereka hadapi, sehingga tercipta suasana pembelajaran yang inklusif dan menghargai keberagaman. Dampaknya, terjadi penurunan kecenderungan sikap intoleransi di kalangan siswa, yang sejalan dengan temuan Murdiono dkk. (2020) bahwa pembelajaran aktif mampu

meningkatkan rasa kepemilikan terhadap nilai-nilai nasionalisme.

Selain itu, integrasi PPKn juga berkontribusi pada peningkatan kecakapan sosial dan literasi digital siswa, yang menjadi kompetensi penting di era post-truth. Melalui pendekatan diskusi interaktif, penggunaan multimedia, serta forum diskusi daring dan luring, siswa dilatih untuk berpikir kritis dan membangun dialog konstruktif. Penelitian Ginting dkk. (2024) menegaskan bahwa literasi digital yang baik menjadi fondasi dalam membentuk sikap kritis dan toleran, sehingga siswa mampu mengidentifikasi bias informasi serta menolak konten manipulatif.

Lebih lanjut, aspek relasional dalam pembelajaran juga mengalami penguatan melalui kegiatan kolaboratif seperti program Bina Iman dan proyek lintas mata pelajaran yang menciptakan interaksi sosial yang harmonis. Model pembelajaran kooperatif terbukti efektif dalam mengurangi konflik antarkelompok serta meningkatkan kemampuan interpersonal siswa. Hal ini selaras dengan temuan Fuaddah (2024) yang menyatakan bahwa lingkungan sekolah yang menghargai keberagaman budaya dan agama akan menghasilkan interaksi sosial yang sehat. Evaluasi melalui rapor pendidikan juga menunjukkan peningkatan indeks kebhinekaan serta stabilitas iklim sekolah. Selain itu, pola komunikasi siswa menjadi lebih terbuka dan inklusif, didukung oleh pembelajaran berbasis dialog yang memberikan ruang aman bagi siswa untuk berbagi perspektif. Temuan ini konsisten dengan penelitian Neminska (2023) yang menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan berbasis dialog interkultural mampu mengurangi stereotip negatif dan memperkuat solidaritas.

Integrasi PPKn juga berperan penting dalam meningkatkan ketahanan siswa terhadap narasi eksklusif dan ekstremis di media sosial. Dengan pemahaman mendalam mengenai hak asasi manusia, demokrasi, dan nilai konstitusional, siswa mampu mengembangkan sikap kritis terhadap konten yang berpotensi memecah belah. Rakhmawati dkk. (2024) menegaskan bahwa penguatan nilai kebangsaan secara sistematis dapat meningkatkan resistensi siswa terhadap ajakan intoleran. Di sisi lain, pembelajaran berbasis isu juga meningkatkan kepekaan sosial siswa terhadap ketidakadilan dan diskriminasi melalui analisis kasus aktual, debat terstruktur, serta refleksi kritis. Hal ini didukung oleh Sabeghi & Mahmoudirad (2023)

yang menyatakan bahwa pendekatan berbasis isu mampu mengembangkan sensitivitas moral dan kemampuan berpikir etis. Selain itu, penggunaan metode storytelling dalam pembelajaran PPKn turut meningkatkan empati interpersonal siswa, sebagaimana ditegaskan oleh Luthfiah (2022) bahwa pendekatan naratif efektif dalam memperkuat kemampuan siswa memahami perspektif orang lain.

Keberhasilan dampak tersebut tidak terlepas dari strategi yang dikembangkan sekolah dalam memperkuat nilai toleransi melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Pada aspek intrakurikuler, sekolah melakukan pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai PPKn secara sistematis melalui koordinasi antara tim kurikulum, guru, dan kesiswaan. Integrasi lintas mata pelajaran ini memperkuat kohesi pendidikan karakter sebagaimana dikemukakan oleh Rosdanilah dkk. (2024). Materi pembelajaran dirancang secara kontekstual melalui pendekatan berbasis kasus dan proyek nyata, sehingga siswa mampu mengaitkan teori dengan praktik sosial. Selain itu, model pembelajaran interaktif seperti diskusi, debat, dan presentasi kelompok menjadi strategi utama dalam menginternalisasi nilai toleransi, yang didukung oleh temuan Luthfiah (2022) terkait efektivitas pembelajaran aktif.

Pada aspek kokurikuler, pemanfaatan teknologi digital menjadi strategi adaptif dalam menghadapi tantangan era post-truth. Sekolah mengoptimalkan penggunaan platform daring, media sosial, serta kolaborasi dengan narasumber eksternal melalui webinar dan workshop bertema toleransi dan keberagaman. Hal ini sejalan dengan rekomendasi Sumaryati dkk. (2020) yang menekankan pentingnya pemanfaatan media digital untuk meningkatkan literasi informasi dan mencegah disinformasi. Sementara itu, pada aspek ekstrakurikuler, sekolah menyelenggarakan berbagai kegiatan berbasis keberagaman seperti forum lintas agama, klub diskusi kebangsaan, serta kegiatan sosial lintas kelas seperti “Bakti Sosial Lintas Iman” dan “Dialog Kebinekaan”. Kegiatan ini memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam membangun relasi sosial yang harmonis, sebagaimana ditegaskan oleh Puspita dkk. (2024) bahwa kegiatan ekstrakurikuler berbasis keberagaman efektif dalam memperkuat interaksi sosial.

Selain itu, strategi keteladanan dari guru dan tenaga kependidikan juga menjadi faktor

kunci dalam membentuk budaya sekolah yang inklusif. Kepala sekolah dan guru secara konsisten menyisipkan nilai toleransi dalam berbagai kegiatan formal maupun informal, yang selaras dengan temuan Armianti dkk. (2024) bahwa keteladanan memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan karakter siswa. Evaluasi dan monitoring juga dilakukan secara berkelanjutan melalui observasi perilaku, jurnal reflektif, serta asesmen berbasis proyek untuk mengukur internalisasi nilai toleransi. Pendekatan ini memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif terhadap perkembangan afektif siswa.

Lebih jauh, keterlibatan keluarga dan masyarakat turut memperkuat keberlanjutan nilai toleransi di luar lingkungan sekolah. Melalui pertemuan orang tua dan seminar keluarga, sekolah membangun sinergi dalam proses pendidikan karakter, sebagaimana ditegaskan oleh Ridha dkk. (2025) bahwa kolaborasi antara sekolah dan keluarga merupakan faktor kunci keberhasilan pendidikan karakter. Dalam konteks era post-truth, tantangan berupa arus disinformasi yang masif juga direspons melalui penguatan literasi digital siswa. Antoliš dkk. (2024) menunjukkan bahwa paparan disinformasi dapat mengikis nilai kebangsaan, sehingga pendidikan literasi menjadi krusial. Oleh karena itu, siswa dibekali kemampuan verifikasi informasi dan analisis kritis, yang sejalan dengan temuan Ginting dkk. (2024) dan Yang dkk. (2021) terkait pentingnya literasi digital dalam mencegah intoleransi.

Dengan demikian, integrasi Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Katolik Santa Maria II Malang tidak hanya berdampak pada pembentukan sikap toleran secara individual, tetapi juga membentuk ekosistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan resilien terhadap tantangan sosial di era digital. Pendekatan holistik yang mencakup kurikulum, pembelajaran, budaya sekolah, serta kolaborasi dengan keluarga dan masyarakat menjadi model strategis yang dapat direplikasi dalam kebijakan pendidikan untuk memperkuat nilai toleransi secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) ke dalam kurikulum SMP Katolik Santa Maria II Malang secara transdisipliner terbukti efektif dalam mencegah sikap intoleransi peserta didik di era *post-truth* melalui strategi pembelajaran

kontekstual, forum dialogis, serta penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sekolah. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada temuan bahwa kombinasi antara literasi digital, pedagogi partisipatif, dan kebijakan sekolah yang inklusif mampu menciptakan ruang edukatif yang tidak hanya menanamkan nilai toleransi secara kognitif, tetapi juga mendorong internalisasi nilai tersebut dalam praktik sosial siswa di tengah gempuran disinformasi digital. Untuk memperkuat hasil ini secara praktis, direkomendasikan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan lokal, pelatihan literasi digital dan manajemen konflik bagi guru, serta kolaborasi lintas aktor sekolah dalam membangun budaya pendidikan yang ramah perbedaan. Temuan ini juga membuka ruang bagi penelitian lanjutan mengenai efektivitas integrasi nilai kewarganegaraan dalam konteks sekolah multikultural lainnya, khususnya dalam merespons tantangan globalisasi informasi dan polarisasi ideologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Armianti, R., Bungana, R., & Setiawan, D. (2024). Paradigma Baru Pembelajaran PKN di Sekolah Dasar dalam Membentuk Karakter Siswa di Era Revolusi Industri 4.0. *Edu Cendikia Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 4(02), 656–664. <https://doi.org/10.47709/educendikia.v4i02.4623>
- Andriani, S. (2024). *The Role of Citizenship Education in Building Global Citizens*. 179–183. <https://doi.org/10.62966/ijose.vi.760>
- Azzahra, A. H., Nawry, N., & Nelwati, S. (2024). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Identitas Nasional. *Sinar Dunia*, 3(2), 23–31. <https://doi.org/10.58192/sidu.v3i2.2287>
- Arifin, Z. (2024). Manajemen Konflik dalam Pendidikan: Pendekatan Kolaboratif di Sekolah. *Mutiara, Bau Bau/Mutiara*, 3(1), 38–53. <https://doi.org/10.59059/mutiara.v3i1.1960>
- Antoliš, K., Pačelat, J., & Strmečki, S. (2024). Combating Disinformation in the Digital Era Assessing Perceptions, Validation Practices and Educational Interventions. *Deleted Journal*, 33(4), 345–358. <https://doi.org/10.59245/ps.33.4.1>
- Bordier, M., Goutard, F., Antoine-Moussiaux, N., Pham-Duc, P., Lailier, R., & Binot, A. (2021). Engaging Stakeholders in the Design of One Health Surveillance Systems: A Participatory Approach. *Frontiers in Veterinary Science*, 8, 646458. <https://doi.org/10.3389/FVETS.2021.646458>
- Darmawati, B. (2022). *Culture and interural communication*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/a2563>
- Efendi, Y., & Saâ, H. (2020). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lembaga pendidikan. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 54–65.
- Fadilah, A. A., Inkaputri, D. A., & Ali, I. B. (2025). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menumbuhkan Sikap Toleransi di Kalangan Siswa. *Tsaqofah*, 5(1), 1090–1099. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v5i1.4725>
- Fuaddah, D., Ambarwati, R., Afidah, M., Rusiana, K. N., Indah Jati, T. I. J. I. J., & Fathoni, T. (2024). Kepemimpinan Inklusif Kepala Sekolah Dalam Menjaga Kerukunan dan Moderasi Beragama di Sekolah. *Social Science Academic*, 2(2). <https://doi.org/10.37680/ssa.v2i2.6299>
- Ginting, A. D. B., Tambunan, I. F., Tarigan, K. E. B., Maharaja, S., Khairani, S., & Siregar, W. M. (2024). Implementasi Pembelajaran PKN Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Era Digital. *Jurnal Sadewa*, 2(3), 32–41. <https://doi.org/10.61132/sadewa.v2i3.917>
- Heriyanto, H. (2018). *Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif*. 2(3), 317–324. <https://doi.org/10.14710/ANUVA.2.3.317-324>
- Hikmah, N., & Nugroho, A. (2024). Pembelajaran PPKN untuk Meningkatkan Sikap Nasionalisme Siswa Sekolah Dasar. *EduInovasi*, 4(3), 2235–2248. <https://doi.org/10.47467/edu.v4i3.6067>
- Hikmat, R., Suryani, S., Yosep, I., & Jeharsae, R. (2024). Empathy's Crucial Role: Unraveling Impact on Students Bullying Behavior - A Scoping Review. *Journal of*

- Multidisciplinary Healthcare*, 17, 3483–3495.
<https://doi.org/10.2147/jmdh.s469921>
- Hidayah, Y., Kurniawan, I. D., & Ginusti, G. N. (2023). Penggunaan literasi informasi untuk pengembangan watak kewarganegaraan: interaksi antara pendidikan kewarganegaraan, teknologi dan bahasa. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(1), 65-75.
- Luthfiyah, L., Suciani, S. R., & Ruslan, R. (2022). Social Sensitivity Improvement through Collaborative Learning Models in Islamic Religious Education. *Jurnal Tarbiyatuna*, 13(1), 29–42.
<https://doi.org/10.31603/tarbiyatuna.v13i1.5809>
- Murdiono, M., Suyato, S., & Arpanudin, I. (2020). Strategi Penguatan Nasionalisme Perbatasan Indonesia. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 34-43.
- Neminska, R. (2023). Competences of democratic citizen education (competences for democratic culture). *Годишник*, 20.
<https://doi.org/10.15547/ybfe.2023.06>
- Puspita, A. M. I., Al Ghony, A. E., Paramita, M. R., Albahri, N. M., Ayu, M. N., & Gumilar, G. P. D. (2024). Optimalisasi Peran Pendidikan Pancasila dalam Menumbuhkan Sikap Toleransi dan Kepedulian Sosial di Kalangan Mahasiswa.
<https://doi.org/10.59581/garuda.v2i2.3216>
- Ramadhani, T., Widiyanta, D., Sumayana, Y., Santoso, Y., & Agustin, D. (2024). The Role Of Character Education In Forming Ethical And Responsible Students. *International Journal of Graduate of Islamic Education*.
<https://doi.org/10.37567/ijgie.v5i2.3064>
- Rosdanilah, R., & Novebri, N. (2024). Penerapan Pendidikan Karakter pada Siswa untuk Meningkatkan Nilai-nilai serta Minat Belajar Siswa di SMK N 2 Panyabungan. *Alfihris*, 3(1), 56–65.
<https://doi.org/10.59246/alfihris.v3i1.1144>
- Roldugin, I. (2023). Thematic Analysis. *Springer Texts in Education*, 463–468.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-04394-9_72
- Ridha, A., Bahij, M. A., Nurachman, A., & Setiawan, R. (2025). Integrasi Pendidikan Karakter dalam Kurikulum Berbasis Nilai Afektif dan Psikomotorik : Tantangan dan Peluang. *Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(1), 245–254.
<https://doi.org/10.62383/risoma.v3i1.565>
- Rodrigues, A. P. B. (2021). *Mediação de conflito escolar*. 1(3), 86–100.
<https://www.telosjournals.com.br/ojs/index.php/isa/article/view/39>
- Rakhmawati, N. A., Suwarjo, S., & Basuki, A. (2024). Implementation of Multicultural Values to Strengthen Students’ Nationalism. *EAJMR East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 3(11).
<https://doi.org/10.55927/eajmr.v3i11.11994>
- Surtini, S., & Muhtar, T. (2024). Teachers’ Pedagogic Competence in Strengthening Character Education of Students in Elementary Schools : Exploring Effective Strategies. *Jurnal Paedagogy : Jurnal Penelitian Dan Pengembangan*, 11(3), 568.
<https://doi.org/10.33394/jp.v11i3.11904>
- Sabeghi, H., & Mahmoudirad, G. (2023). Problem based learning versus reflective practice on nursing students’ moral sensitivity. *BMC Nursing*, 22(1).
<https://doi.org/10.1186/s12912-023-01377-8>
- Sulianti, A., Efendi, Y., & Sa’diyah, H. (2020). JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. Utama, M. A. P., Ramadila, F. S., Rahayu, A. T. P., Sumaryati, S., Retnasari, L., & Winarti, T. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam Penguatan Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 1-12.
- Jannah, M., Sandy, J. N., & Puspita, A. M. I. (2024). Pendidikan Pancasila Sebagai Upaya Membentuk Sikap Toleransi Dalam Masyarakat.
<https://doi.org/10.59581/garuda.v2i2.3221>
- Wettergren, Å., Holmes, M., & Manning, N.

H. (2022). Emotions, politics and truth. *Emotions and Society*, 4(1), 3–6. <https://doi.org/10.1332/263169021x16420816203683>

Yang, J.-H., Hyun, Y.-C., & Park, J.-H. (2021).

Current Status and Development Direction of Digital Literacy Education in Elementary Schools. *Journal of Convergence Information Technology*, 11(5), 138–149. <https://doi.org/10.22156/CS4SMB.2021.11.05.138>